

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMD 2011 – 2016 harus menerapkan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan terpadu (*Unified Budgeting*).

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun secara umum mengalami kenaikan walaupun bersifat fluktuatif. Peningkatan pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak.

Penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2007 s/d 2012 rata-rata meningkat 13,29% setiap tahunnya. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007 s/d 2012 mencapai 94-96% sehingga masih terdapat penghematan 4-6% setiap tahunnya dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Komponen belanja daerah terdiri kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk Belanja Pegawai juga dialokasikan untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

#### 3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

##### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir kinerja pelaksanaan APBD mengalami peningkatan yang signifikan pada sisi pendapatan, terutama ditopang dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2007 kinerja pendapatan daerah sebesar Rp.502.406.950.000,00 meningkat menjadi Rp.901.379.298.000,00 pada tahun 2012.

Pada sisi PAD kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata 24,56%. Pada tahun 2007 sebesar Rp.21.989.783.000,00 dan meningkat menjadi Rp.57.298.239.000,00 pada tahun 2012. Berikut disajikan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2007 s/d 2012:

Tabel.T-III.1  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN						RATA-2 PER TUMBUHAN (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.989.783	23.692.306	27.666.707	29.488.179	48.359.915	57.298.239	24,72
1.1.1	Pajak Daerah	3.677.694	4.170.577	4.876.459	5.155.151	6.006.625	7.954.645	17,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.156.655	12.365.333	16.731.537	17.923.822	11.626.055	14.058.542	7,81
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	839.118	1.222.258	1.805.264	1.617.267	2.903.227	3.139.175	34,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.316.315	5.934.137	4.253.446	4.791.938	27.824.006	32.145.876	94,89
1.2	DANA PERIMBANGAN	448.341.853	500.978.588	520.650.372	534.435.121	583.216.975	703.480.864	9,61
1.2.1	Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak	27.232.853	32.864.274	30.306.732	40.760.726	48.580.538	61.926.220	18,81
1.2.2	Dana Alokasi Umum	371.997.000	406.718.314	429.136.640	435.690.795	480.580.537	589.829.914	9,88
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.112.000	61.396.000	61.207.000	57.983.600	54.055.900	51.724.730	1,67
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	32.075.313	31.907.503	47.188.828	131.792.082	226.660.054	197.898.434	57,19
1.3.1	Hibah	10122365	8.482.424	86.819	824.269	986.005	842.483	147,86
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	18686851	18660728	22.074.842	27.845.307	29.581.537	27.659.934	8,81
1.3.3	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	2.996.567	4.195.851	18.351.031	67.320.004	175.238.937	145.874.996	151,76
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	269.528	568.500	6.676.135	35.802.500	20.853.574	23.521.020	318,52
JUMLAH PENDAPATAN		502.406.950	556.578.398	595.505.909	680.422.531	858.236.946	958.677.538	13,97

Sumber: APBD KAB. PACITAN

3.1.1.2 Belanja Daerah

Kinerja APBD juga bisa dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Perkembangan belanja APBD Kabupaten Pacitan dapat di lihat dalam Tabel T-III.2 sebagai berikut :

Tabel.T-III.2  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Pacitan

Rp. (000)

NO	URAIAN	TAHUN						RATA2 PER TUMBU HAN (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	277.541.348	454.261.692	405.015.785	520.515.875	570.148.800	656.008.622	21,19
2.1.1	Belanja Pegawai	225.528.854	299.461.433	348.084.175	450.708.633	497.212.770	562.704.319	20,40
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	-	6.335.771	3.076.000	14.944.599	7.773.449	8.542.808	59,26
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.756.484	4.097.326	5.890.057	9.162.940	11.519.575	16.163.946	20,69
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem.Kab/Kota dan Desa	1.833.171	1.703.808	2.454.612	2.862.503	2.862.551	2.736.168	9,69
2.1.7	Belanja Bantuan Keu kpd Pem.Prov,Pemda dan Pem.Bawahan	37.644.294	37.735.498	45.414.070	42.230.137	47.210.287	65.097.837	12,55
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.778.544	1.949.139	96.870	607.060	3.570.165	763.543	170,15
2.2	BELANJA LANGSUNG	201.634.595	235.732.206	193.704.031	159.926.656	277.504.777	308.953.262	13,30
2.2.1	Belanja Pegawai	24.856.762	23.444.562	21.212.928	18.481.261	26.501.880	33.986.089	8,71
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.858.154	83.187.099	75.301.452	69.350.961	106.747.844	121.427.491	13,54
2.2.3	Belanja Modal	105.919.678	129.100.543	97.189.650	72.094.433	144.255.052	153.539.681	15,57
JUMLAH BELANJA		478.175.943	587.015.184	598.719.817	680.442.531	847.653.577	964.961.884	15,36

Sumber: APBD KAB. PACITAN

Berdasarkan pada Tabel T-III.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung APBD Kabupaten Pacitan selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan dimana dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2012 jumlah realisasi belanja tidak langsung rata-rata sebesar 21,19%, sedangkan pada belanja langsung juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar belanja tidak langsung yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 13,30% dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2012. Jika dilihat lebih mendetail pada rincian obyek belanja tidak langsung, kontribusi realisasi rincian obyek belanja tidak langsung terjadi fluktuasi, terutama pada rincian obyek belanja hibah. Sedangkan komponen yang lain pada umumnya mengalami kenaikan.

Komposisi realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah pada APBD Kabupaten Pacitan, pada tahun 2008 sebesar 40,16%, sedang tahun 2009 sebesar 32,35% tahun 2010 turun menjadi 23,50%, tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 32,74 dan 32,02%. Jika dilihat lebih dalam lagi, penurunan kontribusi realisasi belanja langsung terhadap APBD ini juga terjadi secara fluktuatif pada masing-masing jenis belanja, baik belanja

pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Kecenderungan penurunan ini perlu menjadi perhatian yang serius mengingat belanja langsung merupakan kelompok belanja yang langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Gambaran kinerja pembiayaan daerah dapat dilihat dari hasil realisasi selama 6 (enam) tahun mulai tahun 2007 s/d 2012 dapat digambarkan seperti tabel T-III.3 dibawah ini. Jika dilihat dari realisasi pembiayaan daerah mengalami kenaikan rata-rata 6,25% pada sisi penerimaan pembiayaan sedangkan SILPA terjadi fluktuatif mulai dari tahun 2007 s/d 2012 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,63%.

Tabel.T-III.3  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Pacitan

(Rp. 000)								
NO	URAIAN	TAHUN						RATA-2 PER TUMBUHAN (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.603.237	73.260.296	41.589.577	35.517.563	49.363.870	57.223.738	6,25
3.1.1	SILPA	53.702.871	72.507.243	40.589.509	35.196.668	49.040.415	56.947.238	6,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Penjualan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman daerah							
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		104.552					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	900.365	648.500	1.000.067	320.895.000	323.455	276.500	6,38
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.327.000	2.234.000	3.179.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000	(1,19)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	2.050.000	1.300.000	2.968.000	1.500.000	2.750.000	2.250.000	21,48
3.2.3	Pembayaran pokok utang							
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	3.277.000	934.000	210.000	250.000	250.000	250.000	(25,99)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.327.000	2.234.000	3.179.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000	(1,19)

Sumber: APBD KAB. PACITAN

3.1.2 NERACA DAERAH

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Neraca Daerah terus

mengalami pertumbuhan yang positif, rata-rata pertumbuhan pada tahun 2008 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.T-III.4  
Neraca Kabupaten Pacitan  
31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012

(Rp. 000)							
NO	U R A I A N	T A H U N					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2008	2009	2010	2011	2012	
A	AKTIVA						
1	Aset Lancar						
	Kas						
	Kas di Kas Daerah	33.302.557	27.978.220	41.353.007	48.693.881	44.641.436	0,10
	Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran	4.859.444	4.073.940	3.951.770	3.160.078	310.184	(0,32)
	Kas di Bendahara Penerimaan	2.427.508			8.175	118.583	
	Kas di BLUD	2.427.508	3.144.507	3.786.352	5.093.278	3.487.771	0,13
	Kas Bantuan						
	Piutang						
	Piutang PFK Gaji						
	Investasi Jangka Pendek						
	Piutang Pajak	6.346	214	1.695		53.623	
	Piutang Retribusi	10.599	16.789	273.603	590.158	885.298	4,38
	Piutang Lainnya	2.130.697	1.234.658	4.755.303	2.564.561	5.595.168	0,79
	Persediaan	3.104.892	2.378.890	5.240.712	8.026.090	9.874.843	0,43
	Jumlah Aset Lancar	45.869.631	38.827.221	59.370.620	68.128.048	65.335.004	0,12
2	Investasi Jangka Panjang						
	Investasi Non Permanen					7.155.279	
	Investasi Permanen						
	- Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	10.622.407	12.494.407	14.144.905	10.888.382	15.827.616	0,13
	- Pinjaman pada BUMD						
	- Investasi Non Permanen Lainnya	6.455.333	6.777.333	7.127.333	7.477.333	7.827.333	0,05
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	17.077.741	19.271.741	21.272.238	18.365.716	22.982.895	0,09
3	Aset Tetap						
	Tanah	419.926.081	428.196.054	431.051.884	432.121.459	477.538.791	0,03
	Peralatan dan Mesin	103.666.771	125.368.191	156.019.654	173.576.532	205.103.308	0,19
	Gedung dan Bangunan	237.332.546	283.948.974	302.180.840	331.492.774	395.092.460	0,14
	Jalan Irigasi dan Jaringan	397.123.028	435.172.707	462.312.935	538.987.772	581.353.991	0,10
	Aset Tetap Lainnya	12.705.436	16.200.478	19.074.633	31.385.551	36.216.123	0,31
	Konstruksi dalam Pengerjaan					4.274.374	
	Akumulasi penyusutan aset tetap					(168.087.263)	
	Jumlah Aset Tetap	1.170.753.864	1.288.886.406	1.373.133.809	1.522.483.663	1.531.491.787	0,07
4	Aset Lainnya						
	Piutang Angsuran/Jangka Panjang						
	Aset Tak Berwujud			876.500	876.500	1.430.610	
	TGR						
	Kemitraan dengan pihak ketiga	42.101.474	42.070.309	42.530.309	42.168.609	2.306.810.800	13,43
	Aset Lain-lain	1.639.813		6.716.633	1.039.912	13.416.158	
	Dana yang dibatasi penggunaanya					1.775.455	
	Jumlah Aset Lainnya	43.741.288	42.070.309	50.123.443	44.085.021	18.929.035	(0,13)
	JUMLAH ASET AKTIVA	1.277.442.525	1.389.055.679	1.503.900.111	1.653.062.450	1.638.738.722	0,07
B	PASIVA						
1	Kewajiban Jangka Pendek						
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
	- B.L. Utang Kepada Pemerintah						
	Utang Bunga Denda dan Commitment Free						
	Utang pada Pihak Ketiga						
	Utang kepada BUMD						
	Pendapatan diterima dimuka	213.491	266.926	229.300	229.300	229.300	0,03

NO	U R A I A N	T A H U N					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2008	2009	2010	2011	2012	
	Utang Jangka Pendek Lainnya			5.271	790.766	1.431.671	
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>213.491</b>	<b>266.926</b>	<b>285.287</b>	<b>1.020.066</b>	<b>1.660.971</b>	<b>0,88</b>
2	Kewajiban Jangka Panjang						
	Utang Kepada Pemerintah Pusat						
	Utang Bunga						
	Utang Lain-lain						
	Utang Jangka Panjang Lainnya	44.000	42.000				
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>44.000</b>	<b>42.000</b>				
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>257.491</b>	<b>308.926</b>	<b>285.287</b>	<b>1.020.066</b>	<b>1.660.971</b>	<b>0,83</b>
3	Ekuitas Dana Lancar						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	40.589.509	53.196.668	49.040.415	56.947.238	48.439.392	0,06
	Pendapatan yang ditangguhkan	27.586		8.175		118.583	
	Cadangan Investasi Pendek						
	Cadangan Piutang	2.147.642	1.251.661	5.030.602	3.154.719	6.902.184	0,85
	Cadangan Persediaan	3.104.892	2.378.890	5.240.712	8.026.090	9.874.843	0,43
	Dana Lancar lainnya						
	Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaranUtang Jangka Pendek	(213.491)	(266.926)	(234.571)	(1.020.066)	(1.660.971)	1,03
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>45.656.140</b>	<b>38.560.295</b>	<b>59.085.333</b>	<b>67.107.981</b>	<b>63.674.032</b>	<b>0,12</b>
4	Ekuitas Dana Investasi						
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	17.077.741	19.271.741	21.272.238	18.365.716	22.982.895	0,09
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.170.753.864	1.288.886.406	1.373.133.809	1.522.483.663	1.531.491.787	0,07
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	43.741.288	42.070.309	50.123.433	44.085.021	18.929.035	(0,13)
	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(44.000)	(42.000)				
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>1.231.528.893</b>	<b>1.350.186.457</b>	<b>1.444.529.491</b>	<b>1.584.934.402</b>	<b>1.573.403.718</b>	<b>0,06</b>
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>1.277.442.525</b>	<b>1.388.746.752</b>	<b>1.503.614.824</b>	<b>1.652.042.384</b>	<b>1.637.077.751</b>	<b>0,06</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.277.442.525</b>	<b>1.389.055.679</b>	<b>1.503.614.824</b>	<b>1.652.042.384</b>	<b>1.638.738.722</b>	<b>0,07</b>

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan

Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-III.5  
Analisis Rasio KeuanganKabupaten Pacitan

NO	URAIAN	T A H U N				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio lancar (current ratio)	214,85	145,46	207,74	66,79	39,34
2	Rasio quick (quick ratio)	200,31	136,55	189,73	58,92	33,39
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,000201568	0,000222	0,00019	0,000617	0,00101

Sumber: DPPKA Kab. Pacitan

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur dipergunakan untuk belanja gaji pegawai, sedangkan belanja publik ditekankan pada:



1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
3. Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
4. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### 3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

- 3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
- Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel. T-III.6  
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja  
Kabupaten Pacitan Tahun 2008 s/d 2012

(Rp. 000)

No	Uraian	Tahun2008			Tahun2009			Tahun2010			Tahun2011			Tahun2012			RATA-RATA
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	365.959.332	351.282.978	95,99	420.304.925	405.015.785	96,36	530.738.223	520.515.875	98,07	583.072.765	570.148.800	97,78	674.545.396	656.008.622	97,25	97,09
1	Belanja Pegawai	308.307.730	299.461.433	97,13	358.986.729	348.084.175	96,96	457.906.856	450.708.633	98,43	506.826.605	497.212.770	98,10	578.457.293	562.704.319	97,28	97,58
2	Belanja Bunga																
3	Belanja Subsidi																
4	Belanja Hibah	7.095.000	6.335.771	89,30	3.632.000	3.076.000	84,69	14.981.877	14.944.599	99,75	7.927.956	7.773.449	98,05	8.711.842	8.542.808	98,06	93,97
5	Belanja Bantuan Sosial	4.587.180	4.097.326	89,32	6.382.180	5.890.057	92,29	10.295.830	9.162.940	89,00	11.775.430	11.519.575	97,83	16.734.274	16.163.946	96,59	93,01
6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem.Pro/Kab/Kota dan Desa	1.920.311	1.703.808	88,73	2.502.956	2.454.612	98,07	3.187.672	2.862.503	89,80	3.006.913	2.862.551	95,20	2.953.430	2.736.168	92,64	92,89
7	Belanja Bantuan Keu kpd Pem.Prop,Pemda dan Pem. Bawahan	39.429.110	37.735.498	95,70	46.801.060	45.414.070	97,04	43.177.830	42.230.137	97,81	48.435.860	47.210.287	97,47	65.520.620	65.097.873	99,35	97,47
8	Belanja Tidak Terduga	4.620.000	1.949.139	42,19	2.000.000	96.870	4,84	1.188.157	607.060	51,09	5.100.000	3.570.165	70,00	2.167.937	763.543	35,22	40,67
B	BELANJA LANGSUNG	252.051.143	235.732.206	93,53	204.209.874	193.704.031	94,86	194.800.764	159.926.656	82,10	306.137.284	277.504.777	90,65	321.238.171	308.953.262	96,18	91,46
1	Belanja Pegawai	25.726.217	23.444.562	91,13	22.956.632	21.212.928	92,40	18.899.457	18.481.261	97,79	27.271.317	26.501.880	97,18	43.904.577	33.986.089	77,41	91,18
2	Belanja Barang dan Jasa	88.278.728	83.187.099	94,23	78.890.312	75.301.452	95,45	72.715.482	69.350.961	95,37	110.618.376	106.747.844	96,50	126.372.226	121.428.016	96,09	95,53
3	Belanja Modal	138.056.197	129.100.543	93,51	102.362.930	97.189.650	94,95	103.185.824	72.094.433	69,87	168.247.589	144.255.052	85,74	159.961.368	153.539.156	95,99	88,01
<b>JUMLAH</b>		<b>618.010.475</b>	<b>587.015.184</b>	<b>94,98</b>	<b>624.514.800</b>	<b>598.719.817</b>	<b>95,87</b>	<b>725.538.987</b>	<b>680.442.531</b>	<b>93,78</b>	<b>889.210.050</b>	<b>847.653.577</b>	<b>95,33</b>	<b>995.783.568</b>	<b>964.961.884</b>	<b>96,90</b>	<b>95,37</b>

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan

3.2.1.2 Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten Pacitan, maka proporsi belanja aparatur atau belanja pegawai meningkat, sehingga berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-III.7  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kab. Pacitan

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	%
1	Tahun Anggaran 2008	299.461.433.097	587.015.184.892	51,01
2	Tahun Anggaran 2009	348.084.175.719	598.719.817.320	58,14
3	Tahun Anggaran 2010	457.906.856.934	680.442.531.911	67,30
4	Tahun Anggaran 2011	497.212.770.319	847.653.577.677	58,66
5	Tahun Anggaran 2012	562.704.319.406	964.961.884.972	58,31

Sumber: APBD Kabupaten Pacitan

Belanja daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat setiap tahun, yaitu tahun 2008 sebesar Rp.299.461.433.097,00 meningkat menjadi Rp.562.704.319.406,00 pada tahun 2012.

3.2.1.3 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pacitan pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel. T-III.8  
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Pacitan

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata-rata Pertumbuha
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	316.940.795	368.606.089	467.904.215	518.084.200	591.162.841	17,02
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	308.307.730	358.986.729	457.906.856	506.826.605	578.457.293	17,20
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.712.754	7.116.404	6.809.687	8.250.682	9.752.118	10,27
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	1.920.311	2.502.956	3.187.672	3.006.913	2.953.430	12,56
B	Belanja Langsung	252.051.142	204.209.874	194.800.764	306.137.282	321.238.171	9,62
1	Belanja Pegawai	25.726.217	22.956.632	18.899.457	27.271.317	34.904.577	10,96
2	Belanja Barang dan Jasa	88.278.728	78.890.312	72.715.482	110.618.376	126.372.226	11,98
3	Belanja Modal	138.046.197	102.362.930	103.185.825	168.247.589	159.961.368	8,27
C	Pembiayaan Pengeluaran	2.252.000	3.179.000	1.750.000	3.000.000	3.000.000	16,91
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	1.530.000	2.969.000	1.500.000	2.750.000	2.750.000	31,98
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	722.000	210.000	250.000	250.000	250.000	-12,97
	TOTAL (A+B+C)	571.243.937	575.994.963	664.454.979	827.221.482	915.401.012	12,84

Sumber: APBD Kabupaten Pacitan

3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Selama 5 (tahun) tahun berturut-turut, APBD Kabupaten Pacitan mengalami defisit walaupun masih dibawah ketentuan yang berlaku. Kedepan, hal tersebut menjadi tantangan untuk mencari sumber pendapatan daerah secara optimal baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi guna pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Berikut disajikan kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan tahun 2008 s/d 2012:

Tabel. T-III.9  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Realisasi Pendapatan Daerah	546.865.232	586.203.925	691.292.318	856.236.946	958.677.538
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	618.010.475	624.514.800	725.538.987	847.653.577	964.961.884
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.252.000	3.179.000	1.750.000	3.000.000	2.500.000
	Defisit riil	(71.145.243)	(38.310.875)	(34.246.668)	(46.540.415)	(54.197.238)

Sumber: APBD Kabupaten Pacitan

Dalam rangka menutup defisit tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan mengupayakan melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya dan Penerimaan

Piutang Daerah. Berikut dapat dilihat komposisi penutup defisit riil anggaran pada 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel. T-III.10  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.507.243	40.589.509	35.196.668	49.040.415	56.947.238
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	890.000.000	900.365.110	899.702.380	500.000	250.000

Sumber: APBD Kabupaten Pacitan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama 5 (lima) tahun bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan serta pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-III.11  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Kabupaten Pacitan Tahun 2008 s/d 2012

NO	URAIAN	TH. 2008		TH. 2009		TH. 2010		TH. 2011		TH. 2012	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Jumlah SILPA	72.507.243	100	40.589.509	100	35.196.668	100	49.040.415	100	56.947.238	100
1	Pelampauan penerimaan PAD	2.173.537	3,00	2.768.011	6,82	1.630.948	4,63	4.019.912	8,20	5.772.545	10,14
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	6.616	0,01	-8.330.815	-20,52	-1.327.502	-3,77	2.670.077	5,44	12.130.540	21,30
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	13.948.830	19,2	14.864.787	36,62	4.119.617	11,70	8.877.321	18,10	-813.877	-1,43
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	56.378.260	77,76	31.287.526	77,08	30.773.605	87,43	33.473.105	68,26	39.858.030	69,99
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun blm terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: APBD Kabupaten Pacitan

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

#### 3.3.1 ANALISIS PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 11,48% per tahun. Dengan menggunakan dasar tersebut maka dapat diproyeksikan

pendapatan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016  
sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.12  
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2011s/d 2016 Kabupaten Pacitan

(Rp. 000)							
URAIAN	REALISASI TA 2011	REALISASI TA 2012	PAPBD 2013	PERTU MBUHAN	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015	PROYEKSI 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.359.915	57.298.239	59.955.764	9,26	67.334.101	76.556.573	82.483.608
Pajak Daerah	6.006.625	7.954.645	8.230.500	16,23	14.866.500	17.576.663	20.780.889
Retribusi Daerah	11.626.055	14.058.542	16.602.154	10,55	17.133.828	19.601.086	22.541.249
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.903.227.	3.139.175	2.235.917	-0,14	4.354.910	4.572.656	4.801.288
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.824.006	32.145.876	32.887.192	7,78	30.978.863	34.806.169	34.360.182
DANA PERIMBANGAN	583.216.975	703.480.864	755.833.057	10,35	807.131.276	899.916.896	978.134.647
Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak	48.580.538	61.926.220	56.602.134	13,69	54.518.392	62.696.151	65.830.958
Dana Alokasi Umum	480.580.537	589.829.914	647.293.403	11,42	700.743.024	784.832.187	859.391.245
Dana Alokasi Khusus	54.055.900	51.724.730	51.937.520	-2,15	51.869.860	52.388.559	52.912.444
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	226.660.054	197.898.434	236.111.734	13,69	247.412.234	251.575.030	255.813.816
Hibah	986.005	842.483	0	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	29.581.537	27.659.934	36.729.718	-3,08	37.167.595	37.725.109	38.290.986
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	175.238.937	145.874.996	172.511.571	-8,29	180.137.150	182.839.207	185.581.795
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.853.574	23.521.020	26.870.445	6,47	30.107.489	31.010.714	31.941.035
PENDAPATAN DAERAH	858.236.946	958.677.537	1.051.900.556	10,86	1.121.877.611	1.228.048.500	1.316.432.071

Sumber: Bappeda Kab. Pacitan data diolah

3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa penerimaan APBD tahun-tahun sebelumnya. Analisa tersebut digunakan sebagai dasar acuan untuk proyeksi penerimaan masing-masing sumber pendapatan. Dari analisa yang telah dilakukan, untuk PAD selama 5 tahun ke depan naik rata-rata 9,26% per tahun, dana perimbangan diproyeksikan naik rata-rata 11,49% per tahun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik rata-rata 13,69% per tahun. Dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta rencana penggunaannya. Berikut disajikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah:

Tabel. T-III.13  
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
 Kabupaten Pacitan Tahun 2011 s/d 2016

(Rp. 000)

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		REALISASI 2011	REALISASI 2012	PAPBD 2013	PROYEKSI 2014	PROYEKSI 2015	PROYEKSI 2016
1	Pendapatan	858.236.946	958.677.537	1.051.900.556	1.121.877.611	1.228.048.500	1.316.432.071
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)		-	-	-	-	-
3	Penerimaan Pembiayaan	49.363.870	57.223.738	48.689.392	40.554.195	22.958.659	14.013.806
	Total Penerimaan	907.600.816	1.015.901.275	1.100.589.948	1.162.431.806	1.251.007.159	1.330.445.877
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	535.242.667	607.997.533	698.019.076	756.080.689	820.600.028	875.350.507
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	372.358.149	407.903.742	402.570.872	406.351.117	430.407.131	455.095.370

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan data diolah

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diatas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas utama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

**Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

**Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan umum, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang



tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

**Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga.

Berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan:

Tabel. T-III.14  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 s/d 2016

(Rp. 000)							
NO	URAIAN	REALISASI		PAPBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	907.600.816	1.015.901.275	1.100.589.948	1.162.431.806	1.251.007.159	1.330.445.876
A.1	PENDAPATAN	858.236.946	958.677.537	1.051.900.556	1.121.877.611	1.228.048.500	1.316.432.070
A.2	Penerimaan Pembiayaan	49.363.870	57.223.738	48.689.392	40.554.195	22.958.659	14.013.806
B	BELANJA DAERAH	847.653.577	964.961.884	1.098.637.948	1.159.431.806	1.248.007.159	1.327.445.876
B.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	570.148.797	656.008.621	773.453.794	821.124.154	884.584.550	939.820.880
B.1.1	PRIORITAS I	500.075.321	565.440.487	656.698.229	710.564.620	774.401.218	828.458.715
B.1.1.1	Belanja Gaji Dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	497.212.770	562.704.319	653.082.680	707.076.144	770.712.997	824.662.907
B.1.1.2	Belanja Bagi Hasil kpd Pemb. Prov /Kab/Kota dan Desa	2.862.551	2.736.168	3.615.549	3.488.476	3.688.221	3.795.808
B.1.2	PRIORITAS III	70.073.476	90.568.134	116.755.565	110.559.534	110.183.332	111.362.165
B.1.2.1	Belanja Hibah	7.773.449	8.542.808	25.912.432	16.550.500	16.943.322	17.212.755
B.1.2.2	Belanja Bantuan Sosial	11.519.575	16.163.946	5.816.223	7.672.690	5.938.230	5.997.612
B.1.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov. Kab/Kota dan Pemerintah desa	47.210.287	65.097.837	82.826.910	84.336.344	85.001.780	85.851.798
B.1.2.4	Belanja Tidak Terduga	3.570.165	763.543	2.200.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000
B.2	BELANJA LANGSUNG	277.504.777	308.953.262	325.184.153	338.307.652	363.422.609	387.624.996
B.2.1	PRIORITAS I	35.167.346	42.557.046	41.320.847	45.516.069	46.198.810	46.891.792
B.2.1.1	Belanja Administrasi Perkantoran	35.167.346	42.557.046	41.320.847	45.516.069	46.198.810	46.891.792
B.2.2	PRIORITAS II						
B.2.2.1	PROGRAM PRIORITAS PENCAPAIAN VISI DAN MISI	242.337.431	266.396.216	283.863.306	292.791.583	317.223.799	340.733.204
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.363.870	57.223.738	48.689.392	40.554.195	22.958.659	14.013.806
D.1	SILPA	49.040.415	56.947.238	48.439.392	40.304.195	22.708.659	13.763.806
D.2	Penerimaan Piutang Daerah	323.455	276.500	250.000	250.000	250.000	250.000
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000	2.500.000	1.952.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
C.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.750.000	2.250.000	1.952.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
C.2	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
Pembiayaan Netto		46.363.870	54.723.738	46.737.392	37.554.195	19.958.659	11.013.806

Sumber :Bappeda Kab Pacitan data diolah

Lebih jelasnya alokasi penggunaan dana untuk masing-masing prioritas per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-III.15  
Pendanaan Prioritas Kabupaten Pacitan  
Tahun 2011 s/d 2016

URAIAN	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prioritas Pertama (Belanja Wajib mengikat)	535.242.667	607.997.533	698.019.076	756.080.689	820.600.028	875.350.507
Prioritas Kedua (Visi Misi)	242.337.431	266.396.216	283.863.306	292.791.583	317.223.799	340.733.204
Prioritas Ketiga (BTL Selain Gaji, Tunjangan perangkat)	70.073.476	90.568.134	116.755.565	110.559.534	110.183.332	111.362.165
JUMLAH	847.653.574	964.961.883	1.098.637.947	1.159.431.806	1.248.007.159	1.327.445.876

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan data diolah